

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Azed, Abdul, Bari. *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asrun, Andi, Muhammad. *Dinamika Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2019.
- Edowai, Mikael Herminawaty Abubakar, dan Miah Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sulawesi : Pusaka Almailda, 2021.
- Haryoko, Supto. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Kabul, Imam. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Kalam ,2005.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Nasution, Abdul, Fatah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Harfa Creative, 2023.
- Nugroho, Kris, DKK. *Laporan Penelitian Penerapan Teknologi Informasi Pada Pemilu 2019*. Surabaya : Kerjasama KPU RI dan Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga, 2021.
- Noer, Khaerul, Umam. *Partisipasi Publik: Model, Pendekatan, dan Praksis*. Jakarta : Perwatt, 2022.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Reynolds, Andrew, dkk, *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta : Perludem, 2016.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media, 2012.
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Saleh, Sirajudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017.

B. Tesis

- Punto, Raharjo. “Keefektifan Pendistribusian Barang pada PT. Pahala Express Cabang Yogyakarta”. *Tesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

C. Jurnal :

Arif, Muhammad, Andy. “Efektivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan”. *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN* 4 : 4 (Juli – Desember 2018) : 71.

Putri, Putu, Adinda Prameswari Sanjaya dan I Made Wirya Darma. “SILON Application as an Implementation of Egovernment in the DPRD Nomination Stage in the 2024 Election at KPU Bali Province”. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat* 7 : 4 (Desember 2023): 1293.

Rahmawati. “Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia”. 2019, 11.

Rahayu, Mega, Putri, Lita Tyesta A.L.W dan Ratna Herawati. “Sistem Proposional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia”. *Diponegoro Law Journal* 6 : 2 (September 2017): 8-9.

Sari, Yulia. “Optimisasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024”. *Jurnal Tata Kelola Pemilu* 2 : 3 (Mei 2022): 191.

Septian, Ilham, Fajar, dan Muldan Halim Pratama. “Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia”. *Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019* Vol 49 : 1 (Juli 2019) : 1.

Sudrajat, Raharwindy, Kharisma, dkk. “Efektivitas Penyelenggaraan E-government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 3: 12 (Desember 2019): 2145-2151

Kharisma, Dipta, dan Tri Yuniningsih. “Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review* 6 : 2 (September 2017) : 4-5.

D. Internet :

https://www.kpu.go.id/dmdocuments/bab%20I_pendahuluan.pdf diakses pada tanggal 2 mei 2024 pukul 18.04.

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan> diakses pada tanggal 2 mei 2024 pukul 18.10.

<https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999> diakses pada tanggal 2 mei 2024 pukul 18.20.

KPU Bojonegoro Gelar Bimtek Silon untuk Operator Silon Parpol. <https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/berita/baca/7970/kpu-bojonegoro-gelar-bimtek-silon-untuk-operator-silon->. Diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 19.07.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas dan Wewenangnya. <https://fahum.umsu.ac.id/komisi-pemilihan-umum-kpu-tugas-dan-> diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 17.54.

Negara-negara yang Melakukan Perubahan Sistem Pemilu. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/04/NEGARA-> diakses pada tanggal 1 mei 2024 pukul 17.17.

Representasi proporsional anggota campuran. <https://en.m.wikipedia.org/> diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 17.39.

Sistem Pemilihan Umum di Dunia. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/2_OK_-_SISTEM_PEMILU_DI_DUNIA_6. diakses pada tanggal 1 mei 2024 pada pukul 15.07.

Sejarah Komisi Pemilihan Umum. <https://kota-cirebon.kpu.go.id/page/read/36/sejarah> diakses pada tanggal 1 mei 2024 pukul 20.00.

E. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen 1, 2, 3, & 4.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pengganti Undang-undangan Nomor 1 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

